



Strategi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepahiang (Analisis SWOT)

Azuwandri

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

Email: azuwandri24@gmail.com

How to Cite :

Azuwandri. (2022). Strategi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepahiang (Analisis SWOT). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2) . doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2>

ARTICLE HISTORY

Received [12 Juni 2022]

Revised [3 Juli 2022]

Accepted [24 Juli 2022]

KEYWORDS

Policy Strategy, Regional Development, SWOT Analysis

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rencana-rencana Program/Kegiatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021. dengan indikator faktor kekuatan dan faktor kelemahan utama, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif dan kualitatif. Metode analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah analisis SWOT. Jenis data utama yang digunakan adalah data primer dan data sekunder di Kabupaten Kepahiang. Hasil penelitian terhadap penilaian kuisisioner SWOT oleh para responden faktor internal yang menjadi kekuatan (Strength) utama adalah posisi geografis, kualitas SDM dan kelemahannya adalah pendapatan PAD yang kecil, kurangnya upaya sosialisasi potensi daerah ke luar dan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah yang dinilai masih kurang.

ABSTRACT

This research focuses on the selection of policy strategy priorities in Kepahiang District in making a right decision to carry out priority scale development, with the method used in this research is to use a SWOT analysis approach. The results of this study concluded that the results of the weighting of the SWOT questionnaire, then the proposed alternative strategies that can be recommended are the Strength - Opportunity (SO) Strategy, a strategy that uses power to take advantage of opportunities with funding support from the central government in the form of transfers, the availability of facilities and economic infrastructure, developing tourism potential, and maintaining Kepahiang District as an agricultural / coffee granary area.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan regionalisasi membawa dampak sekaligus tantangan dan peluang baru bagi proses pembangunan daerah di Indonesia. Dalam era seperti ini, kondisi persaingan antar pelaku ekonomi semakin tajam dimana tiap pelaku ekonomi (tanpa kecuali) dituntut menerapkan dan mengimplementasikan strategi bersaing yang tepat dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. (Rahman, 2011).

Pemerintah masih memegang peranan penting dalam perekonomian pada umumnya, dan perencanaan pembangunan pada khususnya. Sesuai amanat konstitusi, pemerintah memiliki

kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, dimana dapat diartikan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif. (Penjelasan umum Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan yang terdesentralisasi, pelaksanaan pembangunan di setiap daerah otonom perlu dipersiapkan dengan menyusun konsep pembangunan yang lebih matang yang sesuai dengan potensi, kendala, dan kesempatan yang dimiliki oleh setiap daerah otonom tersebut. Oleh karena itu, setiap daerah akan memiliki prinsip yang berbeda dalam mengimplementasikan konsep dan strategi pembangunannya yang pada akhirnya pembangunan dilaksanakan di suatu wilayah akan bersifat spesifik dan diharapkan unggul secara kompetitif (unggul dalam harga) maupun komparatif (unggul dalam sumber daya) di bidang-bidang perekonomian tertentu.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bervariasi secara geografis, mengakibatkan banyak terjadi kesenjangan pembangunan daerah karena beberapa daerah memiliki sumber daya yang lebih baik daripada daerah yang lain. Susantono dalam Asri Dwi (2010) menyatakan bahwa masalah kesenjangan pembangunan ini menjadi sangat penting karena akan menimbulkan dampak pada stabilitas pembangunan nasional, diantaranya:

- a. Kesenjangan antarwilayah akan menimbulkan standar hidup yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat di wilayah yang kurang diuntungkan;
- b. Masalah pengangguran yang terjadi pada wilayah yang diuntungkan dan memberi beban lebih yang harus ditanggung oleh negara;
- c. Kesenjangan antarwilayah menimbulkan dampak biaya ekonomi tinggi pada wilayah yang lebih pesat perkembangannya, seperti kota-kota besar dan kota-kota metropolitan, dan akan terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) untuk infrastruktur dan pelayanan publik.

Masalah kesenjangan pembangunan ini kemudian bermuara pula pada permasalahan kesenjangan pertumbuhan ekonomi. Disinilah peran kebijakan yang tepat menjadi penting dalam keberhasilan pembangunan dan pemerataannya, karena tiap karakter wilayah memiliki pendekatan pembangunan yang berbeda-beda. Lebih lanjut dinyatakan bahwa proses pengembangan wilayah dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal, diantaranya migrasi manusia, penambahan penduduk alami, potensi sumber daya alam, dan aliran investasi dan teknologi. (Asri Dwi, 2010).

Susantono (2009) menyatakan bahwa pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berbeda-beda antar wilayah sehingga penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan isu permasalahan yang ada di wilayah yang bersangkutan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa proses pengembangan wilayah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, diantaranya migrasi manusia, penambahan penduduk alami, potensi sumber daya alam, dan aliran investasi dan teknologi

Menurut Todaro (2006) tujuan inti dari pembangunan adalah peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan. Tujuan kedua adalah peningkatan standar hidup, yang tidak hanya diartikan sebagai peningkatan pendapatan, tetapi juga penyediaan lapangan pekerjaan, serta perbaikan kualitas pendidikan. Sedangkan tujuan ketiga adalah perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu secara keseluruhan. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan inti pembangunan, adalah mencapai kesejahteraan, perbaikan kondisi ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang menekankan pada pengalokasian anggaran fungsi atau setiap unit satuan kerja pada Tahun 2017, sebagaimana

disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, maupun Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam beberapa kesempatan salah satunya pada pidato presiden, yang menegaskan perlunya pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot program/kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana program/kegiatan dikatakan memiliki bobot yang tinggi jika memberi manfaat yang besar kepada rakyat.

Ketentuan umum yang berlaku tentang sistem perencanaan nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian proses perencanaan harus terintegrasi dengan perencanaan pada tingkat di atasnya.

LANDASAN TEORI

Perencanaan

Perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian (Cunningham dalam Uno, 2009: 1). Perencanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan (Robbins dalam Uno, 2009: 1). Perencanaan yakni suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Uno, 2009: 2). Melalui beberapa pengertian perencanaan tersebut, penulis mengacu pada kesimpulan yang disampaikan oleh Uno (2009: 2) perencanaan yakni suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pembangunan Daerah

Sadono Sukirno (1976) mendefinisikan pembangunan daerah menjadi dua pengertian, pertama, pembangunan dalam suatu daerah, misalnya daerah Jawa Barat, daerah Sumatera Utara, daerah Sulawesi dan sebagainya. Pengertian kedua adalah pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayah dan dalam konteks ini istilah yang lebih tepat adalah pembangunan wilayah. Dalam pengertian kedua ini, strategi pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional.

Khuldun Munji mendefinisikan pembangunan daerah sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara terus menerus, berlandaskan kemampuan kemampuan daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan keadaan daerah, nasional, dan global.

(Kuncoro, 2004 dalam Safi'i , 2007). Kunci keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan adalah koordinasi dan keterpaduan, baik itu keterpaduan antarsektor, antarsektor dan daerah, antarkabupaten/ kota dalam provinsi, serta antarprovinsi dan kabupaten/ kota. Pengembangan metode yang menganalisis perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaannya untuk mengumpulkan data tentang perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya, yang kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Kalau analisis pembangunan nasional dibandingkan dengan analisis pembangunan daerah, maka akan tampak bahwa analisis pembangunan ekonomi daerah sangat ketinggalan, baik ditinjau dari cakupan analisis maupun kedalamannya. Di samping itu, analisis regional yang ada bertitik-tolak dari analisis permasalahan dan kebijaksanaan pembangunan daerah di negara maju, padahal

struktur perekonomian negara maju sangat berbeda dengan struktur perekonomian negara sedang berkembang, demikian juga dengan struktur perekonomian daerahnya. Perbedaan struktur ini mengakibatkan perlunya analisis dan cara pendekatan yang berbeda pula.

Strategi

Menurut Einsiedel dalam Soesilo (2002), strategi berasal dari kata Latin *strategia* yang artinya kantor dari jenderal, selain itu strategi bisa juga diartikan sebagai seni memperlambat atau mempercepat tindakan-tindakan yang berasal dari kata Perancis *strategos*, arti lain dari kata strategi adalah *strategems* atau menuju ke arah sebuah tujuan.

Kotler dalam Sitinjak (2000) menyatakan bahwa strategi adalah sekumpulan cara-cara untuk mencapai tujuan, dan strategi adalah suatu pendekatan logis yang akan menentukan arah sebuah aksi. Salusu dalam Sitinjak (2000) menyatakan bahwa strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Strategi Pembangunan

Stiglitz (1998) menyatakan bahwa strategi pembangunan lebih ambisius daripada dokumen perencanaan, karena strategi pembangunan menyiapkan strategi bukan hanya untuk akumulasi modal dan penempatan sumber daya, tapi juga strategi untuk transformasi masyarakat. Strategi pembangunan memiliki peran penting sebagai pemercepat terjadinya transformasi masyarakat yang bisa dilakukan dengan mengidentifikasi area keuntungan komparatif negara. Mengidentifikasi area ini dan mempublikasikannya sebagai barang publik adalah tanggung jawab pemerintah.

Strategi pembangunan perlu memajukan wacana (*vision*) tentang transformasi, akan seperti apa masyarakat kita 20 tahun mendatang. Wacana ini tentu mengandung tujuan-tujuan kuantitatif, seperti mengurangi kemiskinan (sebanyak setengah) dan memperhatikan pendidikan, namun hal tersebut merupakan elemen-elemen atau target dalam proses transformasi, bukan wacana dari transformasi itu sendiri. Strategi pembangunan kadang dilihat sebagai *blueprint*, sebuah peta yang menggambarkan kemana masyarakat akan menuju.

Dalam membuat strategi kebijakan perlu diperhatikan beberapa aspek, diantaranya menetapkan prioritas, koordinasi, dan *consensus builders*. Semua masyarakat memiliki keterbatasan sumber daya; apalagi bagi masyarakat pada negara miskin. Diatas keterbatasan sumber daya yang dimiliki masyarakat adalah keterbatasan kemampuan (*capacity*) pemerintah, oleh karena itu, strategi pembangunan perlu menetapkan prioritas. Kunci utama dari prioritas adalah kesadaran akan tahapan: hal apa yang perlu dikerjakan terlebih dahulu sebelum hal yang lain..

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini akan menggambarkan desain penelitian yang mengungkapkan jenis penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel dan metode analisis serta metode pengumpulan data dan teknik analisis yang akan digunakan. Metode penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jenis digunakan dalam pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi dan menganalisis. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati sedangkan Metode deskriptif disini bertujuan untuk menguraikan

sifat atau karakteristik mengenai keputusan melalui pengukuran. Tujuan riset dari desain deskriptif bersifat suatu paparan untuk mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam riset, seperti: siapa, yang mana, kapan, dan di mana, studi dengan desain ini dapat dilakukan secara sederhana atau rumit. Periset dituntut untuk melakukan riset dengan standar yang layak, baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah survei yaitu riset yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta tentang gejala-gejala atas permasalahan yang timbul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumusan Strategi

Untuk mengetahui prioritas dan keterkaitan antar strategi berdasarkan pembobotan SWOT-nya, maka dilakukan interaksi kombinasi strategi internal eksternal. Perumusan strategi-strategi tersebut disusun berdasarkan faktor internal, trength dan weakness, serta faktor eksternal opportunity dan threat ke dalam Matriks Interaksi IFAS – EFAS SWOT.

Secara ringkas hasil perumusan matriks IFAS – EFAS, berdasarkan strategi SO, ST, WO, dan WT, dilakukan pembobotan penilaian untuk menentukan skala prioritasnya. Susunan strategi alternatif berdasarkan urutan prioritasnya yang diperoleh dari pembobotan matriks interaksi SWOT disajikan pada tabel 4.5.

Tabel 1 Pembobotan Hasil Kuisiner SWOT

	S = 1.69	W = 1,53
O = 1.68	SO = 3.37	WO = 3.21
T = 1.47	ST = 3.17	WT = 3.00

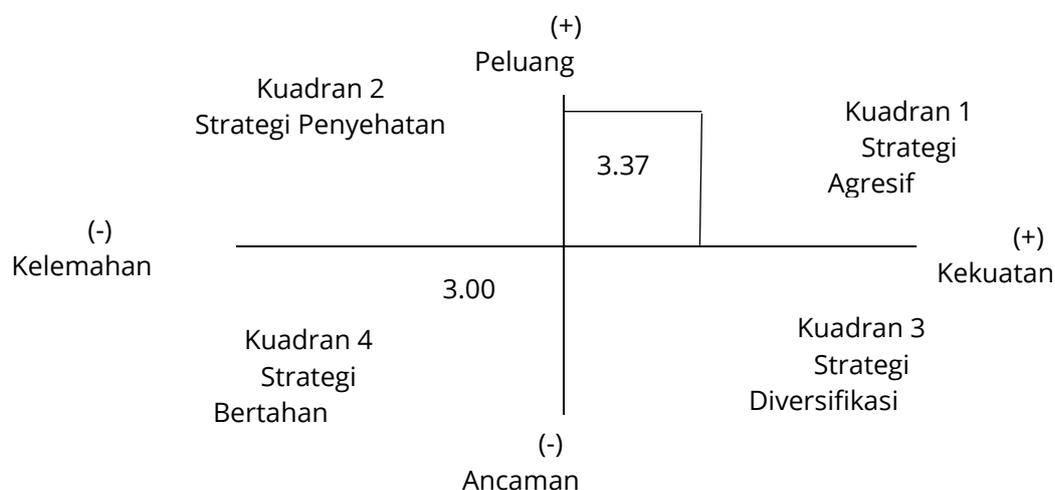
Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari hasil pembobotan kuisiner, maka disusun prioritas strategi berdasarkan kombinasi strategi yang memiliki nilai paling tinggi sampai yang paling rendah.

Tabel 2. Urutan Alternatif Strategi SWOT

Prioritas	Strategi	Bobot Nilai
I	Strength – Opportunity (SO)	3.37
II	Weakness – Opportunity (WO)	3.21
III	Strength – Threat (ST)	3.17
IV	Weakness – Threat (WT)	3.00

Sumber: Matriks Interaksi IFAS-EFAS



Gambar 1. Grand Strategi Kebijakan Pembangunan

Hasil interaksi IFAS – EFAS yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi adalah *Strength – Opportunity (SO)*, yang dapat diterjemahkan sebagai strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada. Kondisi ini menguntungkan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang, karena dari sisi faktor internal, Kabupaten memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kelemahannya, sedangkan dari sisi faktor eksternal, peluang yang ada jauh lebih besar daripada ancaman dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi dan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi 3.37 adalah :

Strength – Opportunity (SO)

dapat di jelaskan dibawah ini :

Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah

Dengan adanya dukungan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer, pemerintah daerah dapat memanfaatkan modal dasar yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang, seperti kondisi geografis yang menguntungkan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, potensi sumber daya alam, serta sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia, untuk memaksimalkan pelaksanaan undang-undang Otonomi Daerah dan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan PAD dan pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang

Sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar dan kawasan ekonomi lainnya.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang dimiliki Kabupaten Kepahiang, pemerintah dapat memanfaatkan etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro untuk semakin memperkuat perekonomian melalui industri kecil, UMKM, dan koperasi, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas

Potensi pariwisata yang ada sebagai modal dasar pengembangan sektor pariwisata

Mengembangkan potensi wisata yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang, dan menjadikan Kabupaten Kepahiang daerah wisata, karena selain memiliki potensi wisata yang cukup baik, kondisi social dan politik di Kabupaten Kepahiang juga cukup kondusif untuk menjadikan Kabupaten Kepahiang sebagai daerah tujuan wisata, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Kepahiang sebagai daerah pertanian

Mempertahankan Kabupaten Kepahiang sebagai daerah lahan pertanian bagi Provinsi Bengkulu, dengan memaksimalkan teknologi yang semakin berkembang sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas unggul, serta memanfaatkan kerja sama dengan daerah-daerah lain disekitar Kabupaten Kepahiang.

Berdasarkan hasil pembobotan kuesioner SWOT maka dapat dijelaskan alternative strategi dibawah ini :

Strategi WO (*Weakness – Opportunity*)

Strategi WO terdiri atas :

1. Memperbaiki kapasitas, etos kerja, dan kinerja lembaga dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah dalam rangka memaksimalkan

pelaksanaan otonomi daerah, dan meningkatkan PAD melalui Undang-undang Pajak dan Retribusi yang baru;

2. Melakukan reformasi birokrasi dan melakukan promosi berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kepahiang dalam rangka menarik minat investor, karena pada dasarnya kondisi sosial politik di Kabupaten Kepahiang cukup kondusif bagi investor;
3. Memeratakan hasil-hasil pembangunan, dan membuat prioritas pembangunan yang paling tepat, mengingat kondisi topografi Kabupaten Kepahiang yang kurang menguntungkan, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan dukungan dari pemerintah pusat, baik berupa dana transfer maupun program-program nasional yang diharapkan dapat menyentuh masyarakat luas;

Strategi ST (*Strength - Threat*)

Strategi ST terdiri atas :

1. Mengelola dengan baik dukungan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer, kondisi geografis yang menguntungkan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, potensi sumber daya alam, serta sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia, dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain serta sehingga mampu menghadapi globalisasi, pasar bebas, dan keterbukaan ekonomi;
2. Mempromosikan berbagai potensi yang ada di Kabupaten Kepahiang, salah satunya potensi wisata dan potensi sumber daya alam untuk menarik investor ke Kabupaten Kepahiang;
3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh masyarakat untuk membangun industri kecil dan menengah yang mulai bangkit di Kabupaten Kepahiang, dalam rangka bersaing dengan produk-produk China yang dikawatirkan mulai menyerbu pasar Indonesia.

Strategi WT (*Weakness - Threat*)

Strategi WT terdiri atas :

1. Memperbaiki kapasitas, etos kerja, dan kinerja lembaga dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur APBD, serta menyelaraskan diri dengan penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat;
2. Memeratakan hasil-hasil pembangunan daerah dan menentukan skala prioritas, mengingat kondisi topografi Kabupaten Kepahiang yang bervariasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain, serta menghadapi dampak dari AFTA, globalisasi dan keterbukaan ekonomi di masa sekarang ini;
3. Melakukan reformasi birokrasi dan mensosialisasikan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Kepahiang dalam rangka menarik minat investor swasta;

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Faktor internal yang menjadi kekuatan (*Strength*) utama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang adalah Kabupaten Kepahiang sebagai daerah pertanian, posisi geografis

Kabupaten Kepahiang yang berada diantara daerah-daerah lain yang sudah maju dan memiliki berbagai fasilitas yang sifatnya nasional maupun internasional, dan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan di Kabupaten Kepahiang. Sedangkan faktor kelemahan utama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang adalah Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD Kabupaten Kepahiang, kurangnya upaya sosialisasi potensi daerah Kabupaten Kepahiang kepada pihak luar, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah yang dinilai masih kurang.

Faktor Eksternal yang menjadi peluang (Opportunity) yang utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, berbagai program pemerintah pusat, dan dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah. Sedangkan yang menjadi faktor ancaman (Threat) yang utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang adalah ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia, dan kurangnya investasi swasta di Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan hasil pembobotan terhadap kuisisioner SWOT, maka usulan strategi alternatif yang dapat direkomendasikan adalah Strategi Strength - Opportunity (SO), yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan alternatif strategi sebagai berikut:

1. Dengan adanya dukungan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer, pemerintah daerah dapat memanfaatkan modal dasar yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang, seperti kondisi geografis yang menguntungkan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, potensi sumber daya alam, serta sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia, untuk memaksimalkan pelaksanaan undang-undang Otonomi Daerah dan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan PAD dan pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Dengan tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang dimiliki Kabupaten Kepahiang, pemerintah dapat memanfaatkan etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro untuk semakin memperkuat perekonomian melalui industri kecil, UMKM, dan koperasi, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas.
3. Mengembangkan potensi wisata yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang, dan menjadikan Kabupaten Kepahiang daerah wisata, karena selain memiliki potensi wisata yang cukup baik, kondisi sosial dan politik di Kabupaten Kepahiang juga cukup kondusif untuk menjadikan Kabupaten Kepahiang sebagai daerah tujuan wisata, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Mempertahankan Kabupaten Kepahiang sebagai daerah pertanian/lumbung kopi bagi Provinsi Bengkulu, dengan memaksimalkan teknologi yang semakin berkembang sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas unggul, serta memanfaatkan kerja sama dengan daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Kepahiang.

Saran

Saran yang bisa disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang membuat prioritas pembangunan yang lebih memperhatikan keberadaan dan keberlanjutan industri kecil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di lingkungan Kabupaten Kepahiang, karena bagaimanapun UMKM memberikan sumbangan yang cukup besar pada struktur perekonomian. UMKM yang dimaksud disini bukan hanya dari jenis kerajinan atau industri pengolahan, tapi juga termasuk

UMKM yang berbasis pertanian, karena pada dasarnya Kabupaten Kepahiang memiliki potensi di sector pertanian.

2. Menyempurnakan berbagai infrastruktur yang mendukung sector pertanian (seperti perbaikan irigasi dan aplikasi teknologi) dan sector pariwisata, apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang ingin menjadikan kedua sektor tersebut sebagai sektor unggulan.
3. Sedangkan saran yang dapat disampaikan untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menambahkan responden yang lebih variatif, misalnya dengan menambahkan para pelaku usaha/pelaku perekonomian

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2013, Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015, Pokok-Pokok Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2016, Warta Anggaran Edisi 30 Tahun 2016 Tentang Majalah Keuangan Publik. Jakarta.
- Effendi Taufiq Drs. 2007. Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Haryanto, Joko Tri. 2004. Potret PAD dan Relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah. Departemen Keuangan Indonesia;
- Mankiw, Gregory. 2003. Principles of Economics 2th Edition (terj);
- Republik Indonesia, 2004, Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL), Jakarta.
- Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Saaty, L. Thomas. 2000. Decision Making For Leaders. University of Pittsburgh;
- Susantono, Bambang. 2009. Strategi dalam Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah. Kata Hasta Pustaka, Jakarta;
- Sukirno, Sadono. 1976. Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta;
- Soesilo, I Nining. 2002. Reformasi Pembangunan Perlu Pendekatan Manajemen Strategik, Buku I. Universitas Indonesia;
- Soesilo, I Nining. 2002. Manajemen Stratejik di Sektor Publik (Pendekatan Praktis), Buku II. Universitas Indonesia;
- Sala-i-Martin, Xavier. 2005. The World Distribution of Income: Falling Poverty and Convergence Period;
- Simon, Julian Lincoln. 1981. The Ultimate Resource;
- Stiglitz, Joseph. 1998. Toward New Paradigm for Development: Strategies, Policies, and Processes;
- Todaro, P. Michael and Smith, C. Stephen. 2006. Economic Development 9th Edition (terj). Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sitinjak, Robert, 2000, Strategi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia: Analisis SWOT. Universitas Indonesia;

Wilkinson, Will. 2007. In Pursuit of Happiness Research, Is It Reliable? What Does It Imply for Policy; Wikipedia. Pembangunan Nasional Indonesia.